



Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Dana Aspirasi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati

Mahmuda Pancawisma Febriharinia^{a,1}, Budi Prasetyo^{a,2}, Mayko Raya Rambu Denandra^{a,3}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ mahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.id; ² budi-prasetyo@untagsmg.ac.id; ³ maykoandra@gmail.com

*email korespondensi : mahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-04-16

Diterima

2025-04-28

Dipublikasikan

2025-04-30

Kata Kunci:

Dana Aspirasi;
Kesejahteraan Masyarakat;
Penyalahgunaan Anggaran;
Peran Pemerintah;
Transparansi;

ABSTRAK

This study discusses the strategic role of the government in overcoming the misuse of aspiration funds and its impact on the welfare of the community in Pati Regency. Aspiration funds, which should be used for development and public services, are often misused for personal or certain group interests, thereby hindering equitable development and lowering public trust in the government. Through a qualitative approach with interviews and observations, it was found that the misuse of aspiration funds had a negative impact in the form of financial losses, development inequality, and degradation of public participation. This research highlights the importance of strengthening regulations, harmonizing policies, increasing transparency and accountability, and active community involvement in supervision. In addition, innovative solutions such as the implementation of information technology and the establishment of an independent supervisory team are key in creating clean and effective governance of aspiration funds. This research recommends synergy between the government, the community, and supervisory institutions for the realization of accountable public fund management that is in favor of the welfare of the people.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh sebab itu, sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Fokus utama harus diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal, seperti pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan sektor pertanian, dan optimalisasi sumber daya kelautan bagi masyarakat pesisir.¹

Permasalahan penyalahgunaan dana aspirasi di Kabupaten Pati menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditelaah bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan dana aspirasi di wilayah tersebut. Selain itu, penting pula untuk memahami apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dana ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pati. Dengan mengetahui akar masalah dan dampaknya, maka dapat dirumuskan berbagai solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyalahgunaan

¹ Ahmad Fauzi, *Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat Pesisir*, Revisi (Gramedia, 2022).

dana aspirasi demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.²

Dana aspirasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk mendukung program-program yang benar-benar bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Prinsip pengelolaan dana aspirasi yang efektif melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, transparansi, yang memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan program dapat diakses dan dipantau oleh publik. Kedua, akuntabilitas, di mana penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada lembaga legislatif dan masyarakat. Ketiga, partisipasi, yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan prioritas dan evaluasi program. Keempat, efisiensi dan efektivitas, yang menuntut penggunaan dana secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan meminimalkan pemborosan. Dengan prinsip-prinsip ini, diharapkan dana aspirasi dapat memberikan manfaat maksimal dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.³

Pengelolaan dana aspirasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk pengalokasian dana yang digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan, serta pengawasan dan pertanggungjawabannya. Program-program yang didanai melalui dana ini biasanya mencakup pembangunan infrastruktur lokal, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan komunitas.⁴

Namun, dalam praktiknya, keberadaan dana aspirasi sering kali memunculkan potensi penyalahgunaan, seperti alokasi yang tidak transparan, pengutamaan proyek yang bersifat politis dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, atau bahkan penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat menghambat tujuan utama dana aspirasi sebagai alat pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di Kabupaten Pati, misalnya, sejumlah kasus terkait pengelolaan dana aspirasi menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Dana tersebut tidak selalu digunakan untuk tujuan yang sesuai, bahkan bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Dana Aspirasi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan dana aspirasi serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Pendekatan ini

² Anissa Nur Silvia and Rita Myrna, ‘PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK’, *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8.1 (2024), doi:10.29040/jie.v8i1.11145.

³ M Suharyo, *Pengelolaan Keuangan Daerah: Teori Dan Praktik* (Graha Ilmu, 2019).

⁴ ‘Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa | Roza | PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)’ <<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13854>> [accessed 8 May 2025].

dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara menyeluruh dan mendalam melalui interpretasi terhadap fenomena sosial yang kompleks.⁵

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat pemerintah daerah, anggota legislatif, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh penggunaan dana aspirasi. Teknik purposive sampling digunakan dalam pemilihan informan, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap isu yang diteliti.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi kepada informan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam menangani penyalahgunaan dana aspirasi serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyalahgunaan Dana Aspirasi di Kabupaten Pati

Dana aspirasi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada anggota DPRD untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemilihannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Aspirasi. Peraturan tersebut mengatur mekanisme, penggunaan, dan pengawasan dana aspirasi agar dapat mendukung pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kastomo selaku anggota DPRD Kabupaten Pati bahwa penggunaan dana aspirasi di Kabupaten Pati meliputi berbagai bidang untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana ini paling banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Selain itu, dana aspirasi juga digunakan untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, serta program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial dan pelatihan keterampilan. Proyek-proyek lingkungan seperti taman kota, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam juga menjadi fokus utama, guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan berbagai bidang tersebut, dana aspirasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari segi pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.⁷

Berdasarkan hasil observasi penulis, penggunaan dana aspirasi di Kabupaten Pati mencakup berbagai sektor yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.16 (Rajagrafindo, 2016).

⁶ Mei Susanto, 'Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi) DPR RI: Tinjauan Kedudukan Dan Kebutuhan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24.2 (2017), pp. 255-78, doi:10.20885/iustum.vol24.iss2.art5.

⁷ Kastomo Kastomo, DPRD Kabupaten Pati, 2024.

masyarakat. Observasi menunjukkan bahwa dana ini banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan saluran air, yang secara langsung memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Selain itu, ada alokasi untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang terlihat dari pembangunan atau renovasi sekolah serta fasilitas layanan kesehatan.⁸ Observasi juga menunjukkan adanya dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal, seperti pemberdayaan UMKM dan program pelatihan keterampilan, guna menciptakan lapangan kerja baru.⁹

Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa langkah dalam mengatasi penyalahgunaan dana aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

1) Penguatan Regulasi

Penguatan Regulasi merupakan langkah mendasar yang harus diambil pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan dana aspirasi. Regulasi yang ada harus disusun lebih detail untuk mengatur seluruh tahapan pengelolaan dana aspirasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kastomo selaku anggota DPRD Kabupaten Pati “Regulasi itu sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa penggunaan dana aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini, masih ada celah dalam aturan, terutama dalam pengawasan pelaksanaan proyek. Regulasi yang ada perlu diperketat, termasuk mekanisme perencanaan agar proyek yang didanai benar-benar berdasarkan musyawarah dengan masyarakat.”¹⁰

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, proses musyawarah yang dilakukan di tingkat masyarakat cenderung formalitas dan tidak sepenuhnya menggali kebutuhan prioritas warga. Banyak proyek yang akhirnya dilaksanakan kurang relevan dengan kebutuhan nyata, seperti pembangunan fasilitas umum yang jarang digunakan atau infrastruktur yang kualitasnya tidak memadai. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek sering kali hanya dilakukan secara administratif tanpa inspeksi lapangan yang memadai, sehingga celah penyalahgunaan dana tetap terbuka. Observasi ini mempertegas pentingnya regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar pengelolaan dana aspirasi dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

2) Harmonisasi Regulasi

Selain memperkuat regulasi di tingkat lokal, pemerintah juga perlu memastikan adanya harmonisasi dengan regulasi di tingkat nasional. Harmonisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih peraturan yang dapat menciptakan celah bagi penyalahgunaan dana aspirasi. Regulasi di tingkat lokal sering kali tidak sinkron dengan pedoman nasional, yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana.

⁸ Risma Neta Lestari, Yani Achdiani, and Gina indah Permata Nastia, ‘Peran Pekerja Sosial Dalam Pengelolaan Dana PKH Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Keluarga’, *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 5.2 (2024), pp. 127–48, doi:10.52423/jkps.v5i2.36.

⁹ Adrianus Juan Sebastio and others, ‘UPAYA SEKOLAH EKSPOR DALAM MENINGKATKAN EKSPOR INDONESIA MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM TAHUN 2022’, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.3 (2023), pp. 211–17, doi:10.55681/seikat.v2i3.516.

¹⁰ Kastomo, ‘DPRD Kabupaten Pati’.

3) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Penggunaan dana aspirasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah dengan mewajibkan pelaporan penggunaan dana aspirasi melalui sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas. Sistem ini harus didesain agar mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga publik dapat ikut memantau pengelolaan dana tersebut.

Setiap proyek yang dibiayai oleh dana aspirasi harus disertai laporan rinci yang mencakup:

- a. Rincian Penganggaran: Informasi mengenai alokasi dana, termasuk rincian jenis proyek, lokasi, dan pihak pelaksana, yang harus dipublikasikan sebelum proyek dimulai.
- b. Dokumentasi Pelaksanaan: Proses pelaksanaan proyek harus didokumentasikan, termasuk foto progres, kontrak kerja, dan rincian pengeluaran, untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
- c. Laporan Hasil: Setelah proyek selesai, pemerintah wajib menyediakan laporan hasil yang memuat evaluasi efektivitas proyek, termasuk tanggapan masyarakat terhadap manfaat yang dirasakan.

4) Pengawasan yang Lebih Ketat

Pengawasan terhadap penggunaan dana aspirasi perlu diperketat untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat membentuk tim pengawasan independen yang melibatkan berbagai unsur, seperti inspektorat daerah, lembaga anti-korupsi, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam memantau pengelolaan dana aspirasi.

Untuk mendukung kerja tim pengawasan, pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi digital seperti sistem e-monitoring yang memungkinkan pengawasan secara real-time. Dengan adanya platform ini, progres penggunaan dana aspirasi dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat, sehingga menciptakan tekanan moral bagi pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja secara jujur dan profesional.

Hasil wawancara dengan salah satu pejabat inspektorat daerah mengungkapkan pentingnya pengawasan yang intensif terhadap penggunaan dana aspirasi. Dalam dialog tersebut, narasumber menyatakan: "Pengawasan masih menjadi tantangan, terutama pada tahap pelaksanaan di lapangan. Banyak proyek yang dilaporkan selesai, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kami memerlukan tim independen yang bisa memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga realisasi, diawasi secara ketat."¹¹

Berdasarkan observasi penulis, pengawasan yang ada saat ini masih cenderung lemah, terutama pada tahap evaluasi dan pelaporan. Hal ini membuka peluang bagi praktik-praktik penyimpangan, seperti laporan fiktif atau penggelembungan anggaran. Banyak proyek yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat karena kurangnya kontrol yang efektif.

¹¹ Teguh Susilo, Pegawai Inspektorat Kabupaten Pati, 2024.

5) Peningkatan Kapasitas Aparatur

Aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan dana aspirasi memegang peranan penting dalam memastikan alokasi dan penggunaan dana tersebut berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat. Namun, kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis dalam tata kelola keuangan daerah sering kali menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahan administratif, yang tidak hanya menghambat efektivitas program, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan dana, termasuk praktik korupsi.

Selain pelatihan, pemerintah juga dapat mengadakan program sertifikasi bagi aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana aspirasi, sehingga mereka memiliki standar kompetensi yang diakui. Evaluasi berkala terhadap kinerja aparatur juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan diterapkan secara optimal di lapangan.¹²

Dengan peningkatan kapasitas ini, aparatur tidak hanya mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan efektif. Hal ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dana aspirasi, meningkatkan efektivitas program pembangunan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana aspirasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proyek yang didanai benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.¹³ Dalam proses perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan, masyarakat harus dilibatkan secara aktif agar mereka dapat memberikan masukan yang relevan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti:

- a. Musyawarah Desa atau Kelurahan: Setiap rencana penggunaan dana aspirasi harus didasarkan pada musyawarah yang melibatkan perwakilan warga, tokoh masyarakat, dan stakeholders lainnya. Dalam forum ini, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat didiskusikan secara mendalam, sehingga prioritas proyek menjadi lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan lokal.
- b. Pengawasan Aktif: Masyarakat berperan sebagai pengawas yang memantau jalannya proyek sejak tahap awal hingga selesai. Dengan begitu, potensi penyimpangan seperti penggelembungan anggaran atau penunjukan kontraktor fiktif dapat diminimalisir.
- c. Pelaporan dan Evaluasi: Masyarakat juga harus memiliki akses untuk memberikan feedback dan evaluasi terhadap proyek yang telah selesai, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk pengelolaan dana aspirasi di masa depan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana aspirasi tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Dengan dukungan masyarakat yang aktif, pengelolaan dana

¹² Arif Mulyono, 'Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Di Daerah', *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 3.1 (2015), pp. 17–34, doi:10.21070/jkmp.v3i1.186.

¹³ Layli Hidayah, 'REVITALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM GERAKAN LITERASI NASIONAL: STUDI PADA PROGRAM KAMPUNG LITERASI', *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 3.1 (2019), pp. 87–98, doi:10.21067/jbpd.v3i1.2819.

aspirasi akan lebih terbuka dan terhindar dari praktik penyimpangan yang merugikan kepentingan publik.

3.2 Dampak Dari Penyalahgunaan Dana Aspirasi Bagi Masyarakat Di Kabupaten Pati

Penyalahgunaan dana aspirasi di Kabupaten Pati memiliki dampak yang merugikan masyarakat secara luas, baik secara finansial maupun sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan sosial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketidakefisienan penggunaan dana aspirasi ini berdampak pada :

A) Kerugian Finansial

Penyalahgunaan dana aspirasi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, atau program-program pemberdayaan masyarakat sering kali disalahgunakan untuk proyek-proyek fiktif atau penggelembungan anggaran. Hal ini mengurangi jumlah anggaran yang dapat benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, atau program pendidikan yang relevan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati manfaat nyata dari pembangunan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, ketidakefisienan penggunaan sumber daya publik ini berpotensi merugikan perekonomian lokal, karena alokasi dana yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan ketimpangan sosial yang lebih luas.

B) Mengurangi Kepercayaan Publik

Terjadinya penyalahgunaan dana aspirasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum disalahgunakan, mereka merasa diabaikan dan dirugikan. Akibatnya, timbul perasaan kecewa yang mendalam terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Selain itu, ketidaksesuaian antara janji pembangunan dengan realisasi di lapangan menciptakan rasa tidak adil yang semakin memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Menurunnya kepercayaan publik ini berdampak pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena mereka merasa bahwa suara dan aspirasi mereka tidak didengar atau diperhitungkan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan atau pengambilan keputusan bersama menjadi berkurang, yang pada akhirnya menghambat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan ketidakpuasan sosial di tengah masyarakat.

C) Ketimpangan dalam Pembangunan

Alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dapat menyebabkan ketimpangan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Proyek-proyek yang tidak tepat sasaran sering kali mengutamakan wilayah atau kelompok yang memiliki koneksi politik atau ekonomi tertentu, sementara daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan layanan publik justru terabaikan. Hal ini berujung pada ketidakadilan sosial, di mana beberapa wilayah atau kelompok

masyarakat tidak mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas umum seperti jalan, layanan kesehatan, pendidikan,¹⁴ atau perbaikan sarana umum lainnya. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar, yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan ini menciptakan disparitas ekonomi dan sosial yang sulit diatasi, menyebabkan sebagian besar masyarakat merasakan dampak langsung dari ketidakadilan tersebut, baik dalam aspek kualitas hidup maupun peluang ekonomi yang tersedia.

3.3 Solusi Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Dana Aspirasi Di Kabupaten Pati

Dana aspirasi bermanfaat untuk masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, penyalahgunaan dana aspirasi dapat mengurangi manfaat tersebut dan merugikan masyarakat¹⁵. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif untuk memastikan penggunaan dana aspirasi yang transparan dan akuntabel. Solusi tersebut meliputi :

A) Implementasi Teknologi Informasi

Penggunaan platform digital dapat membantu memantau alur dana aspirasi secara lebih transparan dan akurat. Teknologi seperti sistem informasi manajemen yang terintegrasi memungkinkan pelacakan real-time atas penggunaan dana aspirasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek. Sistem ini juga dapat memberikan akses publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memantau perkembangan dana aspirasi dan melaporkan jika ada penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi teknologi informasi seperti penggunaan platform digital dapat sangat membantu dalam memantau alur dana aspirasi secara lebih transparan dan akurat. Teknologi seperti sistem informasi manajemen yang terintegrasi memungkinkan pelacakan real-time atas penggunaan dana aspirasi, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek. Sistem ini juga menyediakan akses publik yang luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memantau perkembangan dana aspirasi dan melaporkan jika ada penyimpangan yang terjadi. Berdasarkan data penggunaan teknologi informasi yang telah diterapkan di beberapa daerah, terlihat peningkatan signifikan dalam transparansi dan pengawasan penggunaan dana aspirasi. Misalnya, beberapa pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan publik untuk melihat status proyek secara langsung, memantau penggunaan anggaran, serta memberikan masukan atau laporan atas dugaan penyimpangan. Data ini menunjukkan bahwa dengan integrasi teknologi, pengelolaan dana aspirasi dapat lebih efisien dan terbuka bagi masyarakat, sehingga membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana.

B) Partisipasi Aktif Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana aspirasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat benar-benar

¹⁴ Tatan Sukwika, 'Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6.2 (2018), p. 115, doi:10.14710/jwl.6.2.115-130.

¹⁵ Padilah Padilah, Sri Rahayu, and Yudi Yudi, 'PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (STUDI PADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN BUNGO)', *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 7.3 (2022), pp. 180–91, doi:10.22437/jaku.v7i3.25152.

terakomodasi dengan baik. Forum-forum publik atau musyawarah warga dapat berperan sebagai sarana yang efektif bagi masyarakat untuk memberikan masukan langsung terkait alokasi dan pemanfaatan dana aspirasi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat secara proaktif terlibat dalam pemantauan jalannya proyek-proyek yang dibiayai oleh dana aspirasi. Hal ini membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal, seperti penggelembungan anggaran, penunjukan kontraktor fiktif, atau alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata.

C) Penguatan Pengawasan Internal

Pembentukan tim pengawas internal di setiap level pemerintahan yang khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana aspirasi merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan. Tim ini harus terdiri dari berbagai unsur, seperti inspektorat, bagian hukum, serta perwakilan masyarakat sipil yang memiliki integritas tinggi, yang bekerja secara independen untuk mengevaluasi laporan penggunaan dana aspirasi secara berkala. Pengawasan yang ketat dan komprehensif ini bertujuan memastikan bahwa setiap alokasi dana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan adanya tim pengawas internal yang memiliki kapasitas memadai dan dapat melaporkan temuan dengan transparan, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini. Data dari beberapa daerah menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat oleh tim internal mampu mengurangi tingkat ketidakpatuhan terhadap regulasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana aspirasi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa setiap proyek yang didanai oleh dana aspirasi benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat tanpa adanya penyimpangan yang merugikan.

D) Perbaikan Sistem Hukum

Sistem hukum yang kuat dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran dana aspirasi merupakan langkah yang sangat esensial untuk mengurangi penyimpangan. Regulasi yang jelas dan hukuman yang tegas akan memberikan efek jera kepada para pelaku yang berusaha menyalahgunakan dana aspirasi untuk kepentingan pribadi. Sistem hukum yang kuat juga harus mendukung proses penegakan hukum yang transparan dan adil, sehingga setiap pelanggaran dapat ditangani dengan segera dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, seperti inspektorat dan bagian hukum, ditemukan bahwa masih banyak celah dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan dana aspirasi untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan hukuman yang tegas harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera yang nyata.¹⁶ Selain itu, sistem hukum juga perlu mendukung proses penegakan hukum yang transparan dan adil, sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditangani dan tidak mengulangi praktik yang merugikan masyarakat. Data dari beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem hukum yang kuat dapat mengurangi tingkat pelanggaran hingga 30% dibandingkan dengan daerah yang sistem hukumnya kurang ketat. Dengan demikian, penguatan sistem hukum diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dari penyimpangan dana aspirasi,

¹⁶ Susilo, 'Pegawai Inspektorat Kabupaten Pati'.

sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.

4. KESIMPULAN

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyalahgunaan Dana Aspirasi di Kabupaten Pati: Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi penyalahgunaan dana aspirasi. Hal ini mencakup penguatan regulasi, harmonisasi aturan antara tingkat lokal dan nasional, peningkatan transparansi, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam pengelolaan dana aspirasi.

Dampak Penyalahgunaan Dana Aspirasi bagi Masyarakat di Kabupaten Pati: Penyalahgunaan dana aspirasi membawa berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial yang signifikan, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menciptakan ketimpangan dalam pembangunan. Dana yang diselewengkan dapat mengakibatkan proyek fiktif atau penggelembungan anggaran yang pada akhirnya mengurangi manfaat yang diterima masyarakat..

Solusi untuk Mengatasi Penyalahgunaan Dana Aspirasi di Kabupaten Pati: Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi implementasi teknologi informasi untuk transparansi, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, penguatan pengawasan internal, serta perbaikan sistem hukum dengan sanksi yang tegas. Solusi ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan dana aspirasi yang lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa diselewengkan untuk kepentingan tertentu.

Bagi Pemerintah, Diharapkan perlu secara aktif memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana aspirasi untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi Masyarakat, Diharapkan harus lebih aktif dalam memantau dan memberikan masukan terhadap alokasi dana aspirasi melalui forum-forum publik, sehingga dapat memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi komunitas mereka.

Bagi Pihak Lain, seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga anti-korupsi perlu terus berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana aspirasi, guna menciptakan sistem yang akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.16 (Rajagrafindo, 2016)

Fauzi, Ahmad, *Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat Pesisir*, Revisi (Gramedia, 2022)

Hidayah, Layli, 'REVITALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM GERAKAN LITERASI NASIONAL: STUDI PADA PROGRAM KAMPUNG LITERASI', *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 3.1 (2019), pp. 87–98, doi:10.21067/jbpd.v3i1.2819

Kastomo, Kastomo, DPRD Kabupaten Pati, 2024

Lestari, Risma Neta, Yani Achdiani, and Gina indah Permata Nastia, 'Peran Pekerja Sosial Dalam Pengelolaan Dana PKH Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Keluarga', *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 5.2 (2024), pp. 127–48, doi:10.52423/jkps.v5i2.36

Mulyono, Arif, 'Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Di Daerah', *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 3.1 (2015), pp. 17–34, doi:10.21070/jkmp.v3i1.186

Padilah, Padilah, Sri Rahayu, and Yudi Yudi, 'PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (STUDI PADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN BUNGO)', *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 7.3 (2022), pp. 180–91, doi:10.22437/jaku.v7i3.25152

'Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa | Roza | PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)' <<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13854>> [accessed 8 May 2025]

Sebastio, Adrianus Juan, and others, 'UPAYA SEKOLAH EKSPOR DALAM MENINGKATKAN EKSPOR INDONESIA MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM TAHUN 2022', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.3 (2023), pp. 211–17, doi:10.55681/seikat.v2i3.516

Silvia, Anissa Nur, and Rita Myrna, 'PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK', *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8.1 (2024), doi:10.29040/jie.v8i1.11145

Suharyo, M, *Pengelolaan Keuangan Daerah: Teori Dan Praktik* (Graha Ilmu, 2019)

Sukwika, Tatan, 'Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6.2 (2018), p. 115, doi:10.14710/jwl.6.2.115-130

Susanto, Mei, 'Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi) DPR RI: Tinjauan Kedudukan Dan Kebutuhan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24.2 (2017), pp. 255–78, doi:10.20885/iustum.vol24.iss2.art5

Susilo, Teguh, Pegawai Inspektorat Kabupaten Pati, 2024